

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2018

JL.DEPATI SAID,No. 01, Kel. TAPAK LEBAR
LUBUK LINGGAU - Sumatera Selatan 31616
Telp. (0733) 321570 Fax. (0733) 321570
e-mail : pn.lubuklinggau@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL.DEPATI SAID, No. 01, Kel. TAPAK LEBAR

Telp. (0733) 321570 Fax. (0733) 321570

LUBUK LINGGAU - Sumatera Selatan 31616

e-mail : pn.lubuklinggau@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

LUBUK LINGGAU, 17 Juli 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

PONIJAN, SH
NIP.197105251993031003

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	Error! Bookmark not defined.
Daftar Isi.....	Error! Bookmark not defined.
Daftar Tabel dan Lampiran	Error! Bookmark not defined.
Pernyataan Tanggung Jawab	Error! Bookmark not defined.
Ringkasan	Error! Bookmark not defined.
I. Laporan Realisasi Anggaran	Error! Bookmark not defined.
II. Neraca	Error! Bookmark not defined.
III. Laporan Operasional	Error! Bookmark not defined.
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	Error! Bookmark not defined.
V. Catatan atas Laporan Keuangan	Error! Bookmark not defined.
A. Penjelasan Umum	Error! Bookmark not defined.
A.1. Dasar Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Lubuk Linggau.....	Error! Bookmark not defined.
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	Error! Bookmark not defined.
A.4. Basis Akuntansi	Error! Bookmark not defined.
A.5. Dasar Pengukuran	Error! Bookmark not defined.
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	Error! Bookmark not defined.
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	Error! Bookmark not defined.
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	Error! Bookmark not defined.
B.2. Belanja.....	Error! Bookmark not defined.
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	Error! Bookmark not defined.
C.1. Aset Lancar.....	Error! Bookmark not defined.
C.2. Aset Tetap	Error! Bookmark not defined.
C.3. Piutang Jangka Panjang.....	Error! Bookmark not defined.
C.4. Aset Lainnya	Error! Bookmark not defined.
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	Error! Bookmark not defined.
C.6. Ekuitas	Error! Bookmark not defined.

D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	Error! Bookmark not defined.
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
D.2.	Beban Pegawai	Error! Bookmark not defined.
D.3.	Beban Persediaan	Error! Bookmark not defined.
D.4.	Beban Jasa.....	Error! Bookmark not defined.
D.5.	Beban Pemeliharaan	Error! Bookmark not defined.
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	Error! Bookmark not defined.
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	Error! Bookmark not defined.
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	Error! Bookmark not defined.
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	Error! Bookmark not defined.
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	Error! Bookmark not defined.
D.11.	Beban Lain-lain.....	Error! Bookmark not defined.
D.12.	Kegiatan Non Operasional	Error! Bookmark not defined.
D.13.	Pos Luar Biasa	Error! Bookmark not defined.
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	Error! Bookmark not defined.
E.1.	Ekuitas Awal	Error! Bookmark not defined.
E.2.	Surplus (defisit) LO	Error! Bookmark not defined.
E.3.	Koreksi Nilai Persediaan.....	Error! Bookmark not defined.
E.4.	Koreksi Aset Tetap	Error! Bookmark not defined.
E.5.	Koreksi atas Beban	Error! Bookmark not defined.
E.6.	Koreksi atas Pendapatan.....	Error! Bookmark not defined.
E.7.	Ekuitas Akhir.....	Error! Bookmark not defined.
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	Error! Bookmark not defined.
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	Error! Bookmark not defined.
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	Error! Bookmark not defined.
	Laporan-laporan Pendukung.....	Error! Bookmark not defined.
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan 2017	11
Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4 Tabel Masa Manfaat.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018	35
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018 dan 2017	35
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018	36
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018	36
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017	37
Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017	38
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017.....	38
Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017.....	39
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017	Error! Bookmark not defined.
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 15 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 16 Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 17 Rincian Belanja Dibayar di Muka.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 18 Rincian Saldo Piutang Bukan Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 19 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 20 Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 21 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 22 Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 23 Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 24 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan 31 Desember 2017	Error! Bookmark not defined.
Tabel 25 Rincian Aset Tetap.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 26 Rincian Saldo Tanah	Error! Bookmark not defined.
Tabel 27 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Error! Bookmark not defined.
Tabel 28 Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 29 Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 30 Rincian Tagihan Penjualan Angsuran (TPA).....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 31 Rincian Aset Lainnya.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 32 Rincian Aset tak Berwujud	Error! Bookmark not defined.
Tabel 33. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 34. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	Error! Bookmark not defined.
Tabel 35. Rincian Pendapatan yang Ditangguhkan.....	Error! Bookmark not defined.

Tabel 36. Rincian Pendapatan Diterima di Muka..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 37. Rincian Ekuitas Dana Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 38 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 39 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Aktual..... **Error! Bookmark not defined.**

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

JL.DEPATI SAID, No. 01, Kel. TAPAK LEBAR LUBUK LINGGAU - Sumatera Selatan 31616

Telp. (0733) 321570 Fax. (0733) 321570 e-mail : pn.lubuklinggau@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

LUBUK LINGGAU, 17 Juli 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

PONIJAN, SH
NIP.197105251993031003

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2018 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 1.890.000 atau mencapai 8,26 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp22.891.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp 3.327.378.260 atau mencapai 61,33 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 5.425.284.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 2017 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018			TA 2017
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	22.891.000	1.890.000	8,26	15.806.760
Belanja Negara	5.425.284.000	3.327.378.260	61,33	5.896.755.922

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2018 dan 2017.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp 12.732.082.263, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 50.147.000; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 12.681.935.263; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp50.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 50.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp 0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp 12.682.082.263.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2018	2017	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	50.147.000	(438.500)	49.708.500	(11,336,03)
Aset Tetap	12.681.935.263	(3.210.619.061)	9.471.754.702	(295,05)
Aset Lainnya	0	0	0	0,00
Jumlah Aset	12.732.082.263	(3.210.619.061)	9.521.463.202	(296,56)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	50.000.000	(14.024.724)	35.975.276	(256,51)
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	50.000.000	(14.024.724)	35.975.276	(256,51)
Ekuitas Dana	12.682.082.263	(3.196.594.337)	9.485.487.926	(296,73)
Jumlah Ekuitas Dana	12.682.082.263	(3.196.594.337)	9.485.487.926	(296,73)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	12.732.082.263	3.210.619.061	9.521.463.202	(296,56)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp 1.610.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 2.955.534.387 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp (2.953.924.387) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 0 dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. (2.953.924.387)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp. 3.196.594.337 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (2.953.924.387) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 9.705.260.530 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2.734.151.783 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2018 adalah senilai Rp 12.682.082.263.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2018, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan

timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2018			TA 2017
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	22.891.000	1.890.000	8,26	15.806.760
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		22.891.000	1.890.000	8,26	15.806.760
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	4.212.341.000	2.692.982.330	63,93	4.320.157.790
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.050.443.000	537.155.930	51,13	971.843.632
3.	Belanja Modal	B.2.3.	162.500.000	97.240.000	59,84	604.754.500
	Jumlah Belanja Negara		5.425.284.000	3.327.378.260	61.33	5.896.755.922

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
NERACA
PER 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	31 Desember 2017
ASET			
Aset Lancar C.1			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	50.000.000	0
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	C.1. 2.	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tagihan Ganti Rugi	C.1. 3.	0	0
Persediaan	C.1. 4.	147.000	438.500
Jumlah Aset Lancar		50.147.000	438.500
Aset Tetap C.2			
Tanah	C.2. 1.	7.065.673.000	1.164.639.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	1.810.030.854	1.712.790.854
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	5.140.194.000	2.463.141.950
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(1.522.845.541)	(2.319.274.193)
Jumlah Aset Tetap		12.681.935.263	3.210.180.561
Aset Lainnya C.3			
Aset Lain-lain	C.3. 1.	51.679.000	51.679.000
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 2.	(51.679.000)	(51.679.000)
Jumlah Aset Lainnya		0	0

Jumlah Aset		12.732.082.263	3.210.619.061
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek		C.5	
Uang Muka dari KPPN	C.5. 1.	50.000.000	0
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5 2.	0	14.024.724
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		50.000.000	14.024.724
Jumlah Kewajiban		50.000.000	14.024.724
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar		C.6	
Jumlah Ekuitas Dana		12.682.082.263	3.196.594.337
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		12.682.082.263	3.210.619.061

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	30 Juni 2017
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	1.610.000	6.239.620
Jumlah Pendapatan		1.610.000	6.239.620
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	2.101.365.853	2.162.202.132
Beban Persediaan	D. 3	17.958.100	40.669.950
Beban Barang dan Jasa	D. 4	199.134.406	180.795.538
Beban Pemeliharaan	D. 5	276.117.800	233.789.350
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	30.212.400	28.242.800
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		2.955.534.387	2.761.080.134
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional			
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	277.100
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	277.100

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 13		
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(2.953.924.387)	(2.754.563.414)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	30 Juni 2017
Ekuitas Awal	E. 1	3.196.594.337	2.868.089.337
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(2.953.924.387)	(2.754.563.414)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	9.057.608.949	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	647.651.581	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	(11.523.200)
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	2.734.151.783	2.808.092.250
Ekuitas Akhir		12.682.082.263	2.910.094.973

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Visi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau adalah Pengadilan Negeri Lubuklinggau Yang Agung

Visi Mahkamah Agung adalah "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG", yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Misi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau adalah

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat.
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Yang Efektif dan Effisien.
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Yang Efektif dan Effisien.
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Standar.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Linggau melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan Penyelesaian Upaya Mediasi
2. Meningkatnya penyelesaian perkara
3. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara
4. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat kepada Hukum melalui tindakan penegakan Hukum.
5. Peningkatan penyelesaian eksekusi terhadap putusan yang sudah BHT
6. Tersedianya dukungan management dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.
7. Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan
8. Peningkatan penataan arsip (in aktif)

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Linggau adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar

nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak

berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan

kewajiban jangka panjang.

(1.) Kewajiban Jangka Pendek

(2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

(3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp0*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 1.610.000 atau mencapai 7,03 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 22.891.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Lubuk Linggau adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan negara bukan pajak	22.891.000	1.610.000	7,03
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
4.	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	0	0,00
Total Pendapatan		22.891.000	1.610.000	7,03

1. Meningkatnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
2. Meningkatnya pendapatan jasa giro bank

Perbandingan realisasi PNBP TA 2018 dan 2017 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	2017	Perubahan	
				Rp	%
1.	Penerimaan negara bukan pajak	1.610.000	8.183.620	0	0,00
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0	0

3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0	0
4.	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	0	0	0
Total Pendapatan		1.610.000	8.183.620	0	0,00

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp
2.735.761.783*

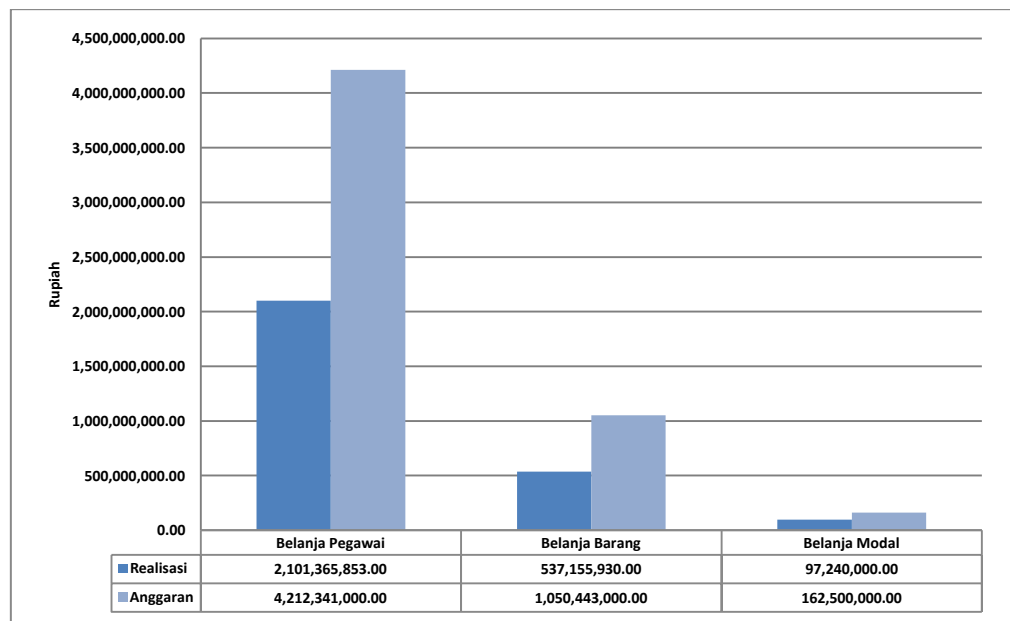
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Lubuk Linggau per 30 Juni TA 2018 adalah sebesar Rp. 2.735.761.783 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 50,42% dari anggaran senilai Rp. 5.425.284.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2018		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4.212.341.000	2.101.365.853	49,88
Belanja Barang	1.050.443.000	537.155.930	51,13
Belanja Modal	162.500.000	97.240.000	59,84
Total Belanja Bruto	5.425.284.000	2.735.761.783	50,42
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	5.425.284.000	2.735.761.783	50,42

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2018 & 2017

1. Adanya realisasi belanja modal
2. Adanya realisasi belanja pegawai
3. Adanya realisasi belanja barang
4. Meningkatnya kebutuhan keperluan pokok perkantoran

Perbandingan realisasi belanja TA 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	2.101.365.853	2.162.202.132	(60.836.279)	(2,81)
Belanja Barang	537.155.930	494.683.738	42.472.192	8,58
Belanja Modal	97.240.000	159.390.000	(62.150.000)	(38,99)
Total Belanja	2.735.761.783	2.816.275.870	(80.514.087)	(2,85)

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
2.101.365.853

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Lubuk Linggau per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 2.101.365.853 dan Rp. 2.162.202.132.

Adanya realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 2.101.365.853 atau realisasi sebesar 49,89 %

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	831.194.500	901.317.200	(70.122.700)	(7,78)
Beban Pembulatan Gaji PNS	11.141	12.138	(997)	(8,21)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	61.819.520	58.044.960	3.774.560	6,50
Beban Tunj. Anak PNS	18.019.650	17.516.440	503.210	2,87
Beban Tunj. Struktural PNS	18.200.000	12.360.000	5.840.000	47,24
Beban Tunj. Fungsional PNS	894.890.000	915.220.000	(20.330.000)	(2,22)
Beban Tunj. PPh PNS	95.930.942	90.645.754	5.285.188	5,83
Beban Tunj. Beras PNS	43.814.100	46.493.640	(2.679.540)	(5,76)
Beban Uang Makan PNS	124.341.000	108.902.000	15.439.000	14,17
Beban Tunjangan Umum PNS	13.145.000	11.690.000	1.455.000	12,44
Total Belanja Brutto	2.101.365.853	2.162.202.132	(60.836.279)	(2,81)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
Total Belanja Netto	2.101.365.853	2.162.202.132	(60.836.279)	(2,81)

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi
Belanja
Barang :
Rp537.155.930

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Lubuk Linggau per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 537.155.930 dan Rp. 494.683.738.

Adanya realisasi belanja barang sebesar Rp. 498.517.530 atau realisasi sebesar 50,81 %

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	133.640.300	145.750.550	(12.110.250)	(8,30)

Belanja Barang Non Operasional	8.426.000	0	8.426.000	0,00
Belanja Jasa	71.092.830	46.568.188	24.524.642	52,66
Belanja Pemeliharaan	272.767.700	228.960.100	43.807.600	19,13
Belanja Perjalanan Dinas	30.212.400	28.242.800	1.969.600	6,97
Total Belanja Brutto	537.155.930	494.683.738	42.472.192	8,58
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	537.155.930	494.683.738	42.472.192	8,58

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja Modal
:Rp97.240.000*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Lubuk Linggau per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 97.240.000 dan Rp. 159.390.000.

Adanya realisasi belanja modal sebesar Rp. 97.240.000 atau realisasi sebesar 59,84 %

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	97.240.000	159.390.000	(62.150.000)	43,43
Total Belanja Brutto	97.240.000	159.390.000	(62.150.000)	(38,99)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	97.240.000	159.390.000	(62.150.000)	(38,99)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
50.000.000

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 50.147.000 dan Rp. 438.500.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau per 30 Juni 2018 dan 2017 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 1 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Kas di Bendahara Pengeluaran	50.000.000	0
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	0	0
Persediaan	147.000	438.500
Total Aset Lancar	50.147.000	438.500

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 50.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 50.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 2 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2018	30 Juni TA 2017
-----	-------	-----------------	-----------------

Jumlah	50.000.000	0
--------	------------	---

saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang persediaan sebesar Rp. 25.000.000

C.1.2. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi

*Bagian Lancar
Tagihan
Tuntutan Ganti
Rugi: Rp 0*

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per tanggal 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni TA 2018

No.	Uraian	30 Juni TA 2018	30 Juni TA 2017
	Jumlah	0	0

Sedangkan mutasi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2017	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2018	0

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang

akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

C.1.3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih-
Bagian Lancar
TP/TGR : Rp 0*

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. , sedangkan per 31 Desember TA 2017 tercatat sebesar Rp. 0

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur :

Tabel 4 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
(dalam satuan Rupiah)

No.	Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan
Total					0

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang

C.1.4. Persediaan

*Persediaan:
Rp0*

Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 147.000 dan Rp. 438.500. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian	30 Juni 2018	31 Desember 2017
1	Barang Konsumsi	147.000	438.500
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		147.000	438.500

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap : Rp
9.705.260.530

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 tersaji sebesar Rp. 12.681.935.263 dan Rp. 3.210.180.561. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan
1	Tanah	7.065.673.000	1.164.693.000	5.901.034.000
2	Peralatan dan Mesin	1.810.030.854	1.712.790.854	97.240.000
3	Gedung dan Bangunan	5.140.194.000	2.463.141.950	2.677.052.050
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0

5	Aset Tetap Lainnya	188.882.950	188.882.950	0
	Akumulasi Penyusutan	(1.522.845.541)	(2.319.274.193)	796.428.652
	Nilai Buku Aset Tetap	12.681.935.263	3.210.180.561	9.471.754.702

C.2.1. Tanah

Tanah:
Rp5.901.034.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.065.673.000 dan Rp. 1.164.639.000.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 7 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
Jumlah						7.065.673.000

tidak ada perubahan nilai perolehan aset tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin : Rp
97.240.000

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.810.030.854 dan Rp. 1.712.790.854.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2017	1.712.790.854
Mutasi Tambah	97.240.000
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2018	1.810.030.854
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	0
Nilai Buku 30 Juni 2018	1.810.030.854

penambahan aset tetap berupa peralatan dan mesin tersebut adalah jumlah belanja semester satu sebesar Rp. 97.240.000 sehingga menambah nilai aset peralatan dan mesin

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
2.677.052.050*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.140.194.000 dan Rp. 2.463.141.950.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2017	2.463.141.950
Mutasi Tambah	2.677.052.050
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2018	5.140.194.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	0
Nilai Buku 30 Juni 2018	5.140.194.000

tidak ada perubahan nilai perolehan aset gedung dan bangunan

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2017	0
Mutasi Tambah	

Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2018	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	0
Nilai Buku 30 Juni 2018	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp 0

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2017	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2018	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	0
Nilai Buku 30 Juni 2018	0

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan : Rp
0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
[Ira.ner13Sst]*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp (1.522.845.541) dan Rp (2.319.274.193).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 8 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	97.240.000	0	97.240.000
2	Gedung dan Bangunan	2.677.052.050	0	2.677.052.050
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
	Jumlah	2.774.292.050	0	2.774.292.050

C.3. Piutang Jangka Panjang

C.3.1. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

*Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi :
Rp 0*

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Rincian Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No.	Debitur	Jumlah (Rp)
Jumlah Total		0

Mutasi Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut :

Saldo per 30 Juni 2017	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2018	0

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.3.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR

*Penyisihan
Piutang tak
Tertagih –
TP/TGR :
Rp 15.820*

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR.

Berikut disajikan perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur:

Tabel 2 Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

No.	Debitur	Kualitas	Nilai Piutang	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan
Jumlah Total					0

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp50.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 50.000.000 dan Rp. 14.024.724. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. , sedangkan per 31 Desember TA 2017 tercatat sebesar Rp. 0

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau per 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 3. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Uang Muka dari KPPN	50.000.000	0
Utang kepada pihak ketiga	0	14.024.724
Jumlah	50.000.000	14.024.724

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN:
Rp 50.000.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 50.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Cadangan
Piutang:
Rp
9.730.808.454

Ekuitas per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 12.682.082.263 dan Rp 3.196.594.337. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2018 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 9.521.463.202 (296,56%) dari nilai per 31 Desember TA 2017. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 12.732.082.263, sedangkan per 31 Desember TA 2017 tercatat sebesar Rp. 3.210.619.061.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNbp : Rp0

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 1.610.000 dan Rp 6.239.620. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan negara bukan pajak	2.406.000	1.610.000	66,91
2.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00

4.	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	0	0,00
Total Pendapatan		2.406.000	1.610.000	66,91

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
: Rp
2.101.365.853

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 2.101.365.853 dan Rp 2.162.202.132. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	831.194.500	901.317.200	(70.122.700)	(7,78)
Beban Pembulatan Gaji PNS	11.141	12.138	(997)	(8,21)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	61.819.520	58.044.960	3.774.560	6,50
Beban Tunj. Anak PNS	18.019.650	17.516.440	503.210	2,87
Beban Tunj. Struktural PNS	18.200.000	12.360.000	5.840.000	47,24
Beban Tunj. Fungsional PNS	894.890.000	915.220.000	(20.330.000)	(2,22)
Beban Tunj. PPh PNS	95.930.942	90.645.754	5.285.188	5,83
Beban Tunj. Beras PNS	43.814.100	46.493.640	(2.679.540)	(5,76)
Beban Uang Makan PNS	124.341.000	108.902.000	15.439.000	14,17
Beban Tunjangan Umum PNS	13.145.000	11.690.000	1.455.000	12,44
Total Beban Pegawai	2.101.365.853	2.162.202.132	(60.836.279)	(2,81)

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan
: Rp

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 17.958.100 dan Rp. 40.559.950. Beban Persediaan merupakan

beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	17.958.100	40.559.950	(22.601.850)	(55,72)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	17.958.100	40.559.950	(22.601.850)	(55,72)

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa : Rp

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 199.134.406 dan Rp. 180.795.538 Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban barang dan jasa	199.134.406	180.795.538	18.338.868	10.14
Total Beban Jasa	199.134.406	180.795.538	18.338.868	10.14

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 276.117.800 dan Rp. 233.789.350 Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
--------	---------	---------	-------------	---

Beban Pemeliharaan	276.117.800	233.789.350	42.382.450	18.10
Total Beban Pemeliharaan	276.117.800	233.789.350	42.382.450	18.10

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 30.212.400 dan Rp. 28.242.800. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Dinas	30.212.400	28.242.800	1.969.400	6.97
Total Beban Perjalanan Dinas	30.212.400	28.242.800	1.969.400	6.97

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0

Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0
--	---	---	---	---

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 330.745.828 dan Rp. 115.500.084. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan & Amortisasi	330.745.828	115.500.084	215.245.744	186.35
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	330.745.828	115.500.084	215.245.744	186.35

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. (9.720) Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	(9.720)	9.720	100
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	(9.720)	9.720	100

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain
per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari

Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.

3.196.594.337 dan Rp. 2.868.098.337

E.2.Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. (2.953.924.387) dan Rp. (2.754.563.414 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 9.057.608.949 dan Rp. 0 Revaluasi Aset tersebut berasal

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 647.651.581 dan Rp. 0 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. (11.523.200) Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi lain-lain	(11.523.200)
Jumlah	(11.523.200)

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.734.151.783 dan Rp. 2.808.092.250

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Transaksi Antar Entitas	2.734.151.783
Jumlah	(2.734.151.783)

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2018, DDEL sebesar Rp. 0 sedangkan DKEL sebesar Rp. 0

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, sebesar 0,- dari total 0,- yang diterima sepanjang tahun 2018.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	
2	ABC	Barang	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2016 disajikan pada lampiran

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp 12.682.082.263 dan Rp. 2.910.094.973

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

1. terdapat tagihan PAM untuk bulan desember 2017 sebesar Rp. 813.910 namun akan dibayarkan januari 2018
2. terdapat tagihan POS untuk bulan desember 2017 sebesar Rp. 1.862.511 namun akan dibayarkan januari 2018
3. terdapat tagihan SPEEDY untuk bulan desember 2017 sebesar Rp. 1.867.000 namun akan dibayarkan januari 2018
4. terdapat tagihan TELEPON untuk bulan desember 2017 sebesar Rp. 230.303 namun akan dibayarkan januari 2018
5. terdapat tagihan LISTRIK untuk bulan desember 2017 sebesar Rp. 9.251.000 namun akan dibayarkan januari 2018

F.2.3. Rekening Pemerintah

nomor rekening 012901000042309, BPg 070 Pengadilan Negeri 01, BRI Cabang Lubuklinggau Bendahara Pengeluaran, Penampung DIPA BUA, saldo akhir per juni 2018 sebesar Rp. 25.000.000

nomor rekening 0129010017966309, RPL 070 Lubuklinggau Untuk PDT Biaya Perkara, BRI Cabang Lubuklinggau Bendahara Penerimaan Penampung PNBPN, saldo akhir per juni 2018 sebesar Rp. 1.264.070.057,00

nomor rekening 012901001252305, BPg 070 Pengadilan Negeri 03, BRI Cabang Lubuklinggau Bendahara Pengeluaran, Penampung DIPA BADILUM, saldo akhir per juni 2018 sebesar Rp.0

F.2.4. Revisi DIPA

Perubahan POK dari akun belanja keperluan perkantoran disebabkan karena meningkatnya keperluan seperti ATK ,Internet dan keperluan sehari-hari lainnya

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

tidak terdapt ralat SPM,SP2D, SSBP, SSPB

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Kuasa	Pengguna	Anggaran	:	Ponijan,	SH
Kuasa	Pengguna	Barang	:	Ponijan,	SH
Pejabat	Pembuat	Komitmen	:	Ponijan,	SH
Pejabat	Penandatanganan /	Penguji SPM	:	RR. Shandy Satyo	Asih, SE
Bendahara	Pengeluaran	:	Leni	Sartika,	A.Md
Bendahara	Penerimaan	:	Rusman	Edwar,	S.Kom
Operator	Keuangan	1	:	Anderiansyah,	S.Kom., M.A.P
Operator	Keuangan	2	:	Roli Rahmadya,	A.Md

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap
 untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2017	2018	Per 30 Juni 2018	Per 30 Juni 2018
A.	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Bantu	7					
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7					
3	Alat Pengolahan	4					
4	Alat Kantor	5					
5	Alat Rumah Tangga	5					
6	Alat Komunikasi	5					
7	Alat Kedokteran	5					
8	Komputer Unit	4					
9	Peralatan Komputer	4					
B.	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50					
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50					

C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
D.	Aset Tetap Lainnya						
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	-					
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
1	Alat Kantor	5					
2	Alat Rumah Tangga	5					
3	Unit Alat Laboratorium	8					
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap							
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya							

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
		U					
			Jumlah :				

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



005
01
1100
098970

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TAHUN 2018

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT